

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Bayu Media, 2007)

Andrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Ansori & Abdul Gafur, *Filsafat Hukum Sjearah, Aliran dan Pemaknaan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,, 2006)

AP. Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Land Reform*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994)

Arba HM, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2019)

Aziz Syamsuddi, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang –Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1997)

\_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2003)

Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1991)

IGN. G. Susila, *Kejahatan Sertifikat Tanah Ganda*, (Malang: UB Press, 2014)

Imam Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2008)

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2002)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2005)

\_\_\_\_\_, *Perihal Undang-Undang*, (Rajawali Pers, Jakarta 2011)

Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000)

John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999)

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?* (Bandung: Remadja Karya, 1984)

Maria SW Soemardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005)

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003)

Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah*, (Jakarta: Kelompok Gramedia, 2019)

\_\_\_\_\_, *Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Permata Aksara, 2015)

Muhammad Yamin Lubis&Abdul Rahim Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2011)

Muwahid, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)

Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2017)

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina, 1987)

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Rocky Marbun, dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta: Visimedia, 2012)

Rudi Suparmono, *Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum*, (Jakarta: Varia Peradilan, 2006)

Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007)

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996)

Soedaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001)

Sudjito, *et al*, *Restorasi Kebijakan Pengadaan, Perolehan, Pelepasan dan Pendayagunaan Tanah Serta Kepastian Hukum di Bidang Investasi*, (Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, 2012) Imam Koeswahyono, *Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2008)

Sugianto & Leliya, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Sebuah Analisis dalam Perspektif Hukum & Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017)

Sunaryati Hartono, *Hukum Pembangunan Ekonomi Pembangunan Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1988)

Suyanto, *Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah, Kajian Yuridis dari UU No. 5 Tahun 1960 Sampai UU No. 11 Tahun 2020*, (Gresik: Unigress Press, 2022)

Syafruddin Kalo, *Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004)

T. Gayus Lumbuun, *Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligence)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)

Urip Santoso, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

**Jurnal Internasional/Jurnal Nasional:**

Aslan Noor, “Hak Sistem Pemilikan Tanah Bangsa Indonesia dan Kaitannya dengan Penerapan Hak-Hak Derivatif dalam Rangka Agunan Utang-Piutang”, Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN), Vol. 4, 2015.

Athoillah islamy, “Nilai-Nilai Pancasila dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah”, Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.51>

B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, Jurnal Hukum Jentera, Vol. 3, 2004.

Dina Catur Ayu Ningtyas, “Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Didasari UUPA”, Jurnal Penelitian Hukum *Court View*, Vol. 3, No.1, Januari, 2023. DOI: <https://doi.org/10.69957/cr.v3i01>

Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” Jurnal Humaniora, Vol. 3, 2012.

Rahayu Subekti, “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Yustita, Vol. 5, 2016. DOI: <https://doi.org/10.20961/yustisia.v5i2.8754>

Rahmat Ramadhani, “Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah”, SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi, Vol. 2, No. 1, 2021. DOI: <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i1.119>

Ronald Dimas, “Publikasi Pendaftaran Tanah di Negara Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum”, Jurnal Serina III Universitas Tarumanegara, Vo.1, No.1, 2021.

Sulasi Rongiyati, “Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Negara Hukum, Vol. 3, 2012. DOI: <http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v3i1.221>

Zainuddin, “The Legal Due Diligence of Land Acquisition for The Public Interest: A Critical Review”, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 4, 2022. DOI: <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i1.159>

**Hasil Penelitian:**

Gunanegara, “Pengadaan Tanah Oleh Negara Untuk Kepentingan Umum”. Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2006

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280)

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6885)

Peraturan Menteri Agraria dan dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2021 Nomor 1202)

Peraturan Menteri Agraria dan dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan  
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilai Pertanahan (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1098)

**Putusan:**

Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor Putusan Nomor:

24/Pdt.G/2023/PN CBD.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Putusan Nomor:

229/PDT/2024/PT BDG.

**Wawancara:**

Hasil wawancara dengan Putra Hutomo, Notaris dan PPAT di Kota Jakarta Selatan, dan pengajar Hukum Agraria di Kampus Pascasarjana Plaza Semanggi, Jakarta, 19 Mei 2025, Pukul 17:00 WIB.

